

Sumber Konflik Perang Sipil Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021

Taufik Muhammad Ramadhan

*Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Singaperbangsa
Karawang*

E-mail: 2110631260044@student.unsika.ac.id

Annisa Febrianti Putri Indrasari

*Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Singaperbangsa
Karawang*

E-mail: 2110631260055@student.unsika.ac.id

Prilla Marsingga

*Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Singaperbangsa
Karawang*

E-mail: prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id

Abstract

The research was intended to find out why the civil war in Myanmar was possible, by trying to identify the sources of the conflict of the post-military coup in 2021. Using a framework of human needs theories developed by John Burton as the chief analysis tool. The theory provides the framework for understanding conflict resolution and peace development by emphasizing the importance of governments to meet the basic needs of their individual citizens. When it comes to the theory of conflict resolution, research that uses a thorough approach to meeting aspects of human need remains rare. The study shows that the source of Myanmar's civil war conflict proved unable to be contained after a military campaign in 2021 caused by various factors, with the failure to meet the basic human need for continued peace and stability. Systematic violations of security, identity, recognition and participation by the military junta have intensified the cycle of conflict, suffering poverty and food among Myanmar's civilians. Meeting these basic human needs is essential to achieving continued peace and reconciliation in Myanmar.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengapa perang sipil di Myanmar bisa terjadi, dengan berusaha mengidentifikasi sumber-sumber konflik nya pasca-kudeta militer di tahun 2021. Dengan menggunakan kerangka teori-teori Kebutuhan Dasar

Manusia (Human Needs Theory) yang dikembangkan oleh John Burton sebagai alat analisis utama. Teori tersebut memberikan kerangka kerja untuk memahami resolusi konflik dan pembangunan perdamaian dengan menekankan pentingnya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar individu warga nya. Jika berbicara mengenai teori resolusi konflik, penelitian yang menggunakan pendekatan menyeluruh pada pemenuhan aspek kebutuhan dasar manusia masih jarang dilakukan. Penelitian ini menunjukkan, sumber konflik Perang sipil Myanmar terbukti tak lagi bisa dibendung pasca kudeta militer pada tahun 2021 yang disebabkan oleh berbagai faktor, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mendasar untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Pelanggaran sistematis terhadap keamanan, identitas, pengakuan, dan partisipasi oleh junta militer telah memperparah siklus konflik, penderitaan kemiskinan dan pangan di antara rakyat sipil Myanmar. Memenuhi kebutuhan dasar manusia ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi yang berkelanjutan di Myanmar.

Keywords: conflict resolution; civil war; conflict analysis; Myanmar; human needs model; military coup

Pendahuluan

Dalam konstelasi politik global, peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara-negara berkembang seringkali menarik perhatian dunia internasional. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian utama dalam studi perdamaian dan resolusi konflik adalah kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021. Peristiwa ini merupakan salah satu dari beberapa kudeta militer yang pernah terjadi di negeri seribu pagoda, negara yang telah lama dihadapkan pada konflik internal dan perjuangan menuju demokrasi yang stabil. Pada tanggal 1 Februari 2021, junta militer Myanmar yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing, mengambil kendali atas pemerintahan yang telah dipilih melalui proses demokratis, menangkap pemimpin sipil yang sah, Aung San Suu Kyi, dan mendeklarasikan keadaan darurat di negara tersebut.¹ Langkah yang otoriter ini memicu aksi protes massal di seluruh Myanmar, di mana jutaan orang turun ke jalan-jalan untuk mengecam kudeta militer dan mendesak pemulihan demokrasi.²

Kudeta militer Myanmar pada tahun 2021 dan berbagai konsekuensi perang sipil yang mengikutinya menjadi sorotan utama dunia internasional karena beberapa alasan yang sangat penting. Pertama, kudeta tersebut menandai kemunduran proses demokratisasi di Myanmar, yang sebelumnya mengalami periode transisi menuju pemerintahan sipil. Kedua, peristiwa ini memperdalam ketegangan politik dan konflik internal di Myanmar, yang berpotensi merugikan stabilitas di tingkat regional.³ Kesengsaraan dan kekerasan yang melanda Myanmar pasca kudeta militer telah menjadi perhatian serius dalam dunia internasional. Pernyataan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, menggambarkan dampak yang

menghancurkan terhadap prospek pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatnya risiko kegagalan negara atau bahkan perang sipil yang lebih luas. Menurut Bachelet, keadaan kacau di Myanmar sejak kudeta telah menciptakan potensi yang sangat besar untuk ketidakamanan massal, dengan konsekuensi yang meluas, termasuk bagi wilayah sekitarnya.⁴ Dampak kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga telah menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap kawasan regional. Sejak kudeta militer tersebut, hampir 1,7 juta orang telah mengungsi akibat konflik di Myanmar, membawa total jumlah pengungsi yang melarikan diri dari pertempuran di negara itu menjadi lebih dari 3 juta orang dan menempatkan beban berat pada sumber daya bantuan di negara Asia Tenggara tersebut. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Institute for Strategy and Policy Myanmar, setidaknya 1.650.661 orang telah terpaksa melarikan diri dari konflik di wilayah-wilayah seperti Sagaing, Magway, Bago, Chin, dan Kayah dalam lebih dari 21 bulan sejak militer berkuasa di Myanmar.⁵ Dengan pengungsi yang terus bertambah, terlihat jelas bahwa kudeta militer Myanmar telah mengguncang stabilitas kawasan, dengan dampak kemanusiaan yang meluas dan meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.

Pertempuran mematikan antara militer dan kelompok sipil bersenjata yang terorganisasi di Myanmar semakin panas mendidih, dengan banyak anak muda mempertaruhkan nyawa mereka setahun setelahnya sejak junta merebut kekuasaan dari pemerintahan. Junta Myanmar telah kehilangan kira-kira 21.000 tentara karena kematian, desersi, atau pembelotan ke kelompok-kelompok perlawanan.⁶ Sebagai tanggapan, junta mengumumkan wajib militer bagi semua remaja putra dan putri, dengan perekrutan dimulai pada bulan April 2024.⁷ Tindakan ini telah menimbulkan rasa takut dan perlawanan di antara kaum muda, sehingga ada yang berupaya lari mendahului perintah wajib militer.⁸ Pengumuman mengejutkan junta tentang tugas wajib telah menimbulkan kepanikan dan ketakutan di antara para remaja, yang membuat banyak orang berpikir untuk meninggalkan negara dengan julukan negeri pagoda emas tersebut.⁹ Selain itu, insiden tragis terjadi sewaktu empat anak tewas dan 15 orang terluka dalam pengeboman sekolah oleh junta militer Myanmar.¹⁰

Perang sipil Myanmar meletus setelah kudeta disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kematian akibat bentrokan antara militer Myanmar dan PDF (Pasukan Pertahanan Rakyat), yang terbentuk dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, ibu rumah tangga, dokter, dan insinyur.¹¹ Mereka dipersatukan oleh tekad untuk menggulingkan kekuasaan militer.¹² Konflik ini juga disebabkan oleh kekerasan yang semakin intens dan meluas, serta serangan oposisi yang terkoordinasi, yang membuat situasi di Myanmar meningkat dari pemberontakan menjadi perang saudara. Data dari kelompok pemantau konflik, Acled, menunjukkan bahwa kekerasan telah menyebar ke seantero negeri.¹³ Pertarungan ini sebetulnya tidak seimbang, PDF memulai

perjuangannya menggunakan ketapel, meskipun kini mereka juga membuat senapan dan bom rakitan.¹⁴ Sedangkan militer bersenjata lengkap dengan daya tembak ke udara yang sering digunakan beberapa bulan terakhir.

Meskipun telah ada penelitian untuk memahami kompleksitas konflik yang terjadi di Myanmar setelah kudeta militer, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang secara spesifik berkontribusi terhadap munculnya perang sipil dalam periode modern seperti ini. Dalam konteks teori resolusi konflik, penelitian yang menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia masih jarang dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara lebih rinci penyebab mengapa perang sipil di Myanmar bisa terjadi pasca-kudeta militernya di tahun 2021, dengan menggunakan kerangka teori-teori Kebutuhan Dasar Manusia (Human Needs Theory) yang dikembangkan oleh John Burton sebagai alat analisis utama. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan perang sipil tersebut terjadi, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap bagi upaya perdamaian dan penyelesaian konflik di Myanmar.

Kerangka Teori

Teori Kebutuhan Dasar Manusia John Burton

Teori Kebutuhan Dasar Manusia John Burton merupakan salah satu pendekatan yang signifikan dalam studi perdamaian dan resolusi konflik. Teori ini dikembangkan oleh John Burton, seorang ahli hubungan internasional yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan dasar manusia sebagai kunci untuk memahami dan menyelesaikan konflik. Menurut Burton, individu memiliki kebutuhan ontologis (yang melekat pada eksistensi manusia) dan genetik yang akan diperjuangkan.¹⁵ Jika proses sosialisasi, di mana individu belajar norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat, tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, itu akan menyebabkan frustrasi, perilaku yang terganggu, dan perilaku anti-sosial baik pada tingkat individu maupun kelompok.¹⁶

Ketidaksesuaian antara kebutuhan dasar manusia dan norma sosial dapat menyebabkan individu merasa tidak puas dan mungkin menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku, bahkan hingga menyebabkan perilaku yang bermasalah dan anti-sosial baik secara individu maupun kelompok. Dalam konteks resolusi konflik, Teori Kebutuhan Dasar Manusia John Burton menekankan pentingnya memahami dinamika kebutuhan dan bagaimana ketidakpuasan terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut dapat memicu atau memperpanjang konflik.¹⁷ Burton menyoroti

bahwa seringkali konflik tidak hanya tentang masalah konkret atau kepentingan politik, tetapi juga tentang kebutuhan emosional dan psikologis yang mendasari perilaku individu dan kelompok. sebagai contoh, ketidakpuasan terhadap kebutuhan akan keamanan atau pengakuan identitas dapat memicu ketegangan antara kelompok etnis atau agama yang berbeda.

Dalam teori ini, dijelaskan bahwa motivasi manusia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang berbeda, termasuk kebutuhan yang diperlukan untuk perkembangan spesies manusia, kebutuhan yang bersifat budaya, dan keinginan yang bersifat sementara atau hanya keinginan yang didasarkan pada pikiran yang idealis.¹⁸ Burton mengusulkan penggunaan istilah yang berbeda untuk membedakan motivasi-motivasi ini dalam konteks sosial dan politik. Dia menggunakan tiga kategori utama: kebutuhan (needs), nilai (values), dan kepentingan (interests).¹⁹ Kebutuhan merujuk pada motivasi yang universal dalam spesies manusia seperti kebutuhan pangan, sementara nilai merujuk pada motivasi yang bersifat budaya seperti beribadah, adat istiadat, dan kepentingan merujuk pada motivasi yang bernegosiasi seperti partisipasi politik.²⁰ Burton juga berpendapat, kebutuhan manusia seperti keamanan, identitas, pengakuan, dan partisipasi sangat penting bagi kesejahteraan individu dan sering kali menjadi akar konflik ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.²¹ Menghubungkan teori ini dengan situasi di Myanmar setelah kudeta tahun 2021 membantu menjelaskan bagaimana tindakan junta militer telah gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memperburuk ketegangan dan berkontribusi pada ketidakstabilan.

Teori Sumber Konflik

Menurut Ichan Malik dalam Ritha Safithri, terdapat lima sumber konflik utama²² yaitu: Pertama, sumber konflik struktural yang berkaitan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang salah dari Pemerintah pusat kepada Daerah; Kedua, sumber konflik kepentingan yang meliputi kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya yang dominan; Ketiga, sumber konflik nilai, berkaitan dengan persoalan adat, ideologi dan interpretasi nilai agama; Keempat, konflik sosial psikologis, berkaitan dengan persoalan salah persepsi, stereotipe, sikap yang negatif dan persoalan identitas kelompok dan daerah; Kelima, konflik data, berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data, yang terlihat jelas misalnya pada manipulasi sejarah, sejarah konteks ulang kondisi saat ini.

Menurut Coser dalam Susan membagi sebab konflik menjadi dua tipe atau bentuk dasar konflik yang terdiri tipe realistik dan tipe non realistik. Tipe realistik memiliki sebab konflik yang konkret atau bersifat materiil, seperti perebutan sumber daya ekonomi, alam, maupun wilayah sedangkan tipe non realistik disebabkan oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat

ideologis atau immaterial seperti isu identitas atau etnis, agama, dan kelompok-kelompok sektarian.²³

Metode Penelitian

Kualitatif deskriptif dipilih sebagai metode yang tepat digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini. Metode kualitatif deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Moleong, adalah suatu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka.²⁴ Jenis data ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumentasi pribadi, catatan, memo, dan dokumentasi lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena secara holistik dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.²⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode *library research*, yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.²⁶ Katibah mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan.²⁷

Peningkatan Kemiskinan Pasca Kudeta

Kudeta militer di Myanmar telah memperburuk kondisi sosial ekonomi yang sudah ada dan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan yang signifikan di negara tersebut.²⁸ Gangguan stabilitas politik yang tiba-tiba dan ketidakstabilan ekonomi yang terjadi kemudian telah menjerumuskan jutaan orang di bawah garis kemiskinan. Menurut data dari *World Bank* tahun 2022, hampir setengah dari populasi Myanmar yaitu sekitar 22 juta orang, telah jatuh ke dalam kemiskinan dalam waktu yang relatif singkat yaitu kurang dari 18 bulan sejak kudeta.²⁹ Hal ini menunjukkan penurunan yang cepat dan substansial dari tingkat kemiskinan yang terlihat sebelum kudeta.³⁰

Menurut siaran pers dari Bank Dunia yang berjudul *Myanmar economic recovery falters as conflict and inflation weigh*, sebelum terjadinya kudeta, Myanmar telah membuat langkah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan selama satu dekade terakhir. Namun, keuntungan yang dicapai

selama periode ini telah dengan cepat dibalikkan, menghapus banyak kemajuan yang telah dibuat dalam mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Dampak ekonomi dari kudeta ini sangat luas, efeknya terasa di berbagai sektor termasuk pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Perekonomian Myanmar secara keseluruhan telah menyusut sebesar 10%, dengan PDB negara yang masih jauh lebih rendah dari tingkat sebelum kudeta.³¹ Kontraksi ekonomi ini semakin memperparah kemiskinan dengan mengurangi kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidup.

Lonjakan tingkat pengangguran yang disoroti dalam temuan utama dari laporan Bank Dunia tentang Pemantauan Ekonomi Myanmar pada Juli 2022 menggarisbawahi dampak multifaset dari kudeta tahun 2021 terhadap dinamika pasar tenaga kerja di negara tersebut. Data tersebut mengungkapkan tren peningkatan pengangguran yang mengkhawatirkan, dengan tingkat pengangguran naik dari 0,17% pada tahun 2020 menjadi 3,69% pada tahun 2023.³² Peningkatan pengangguran yang signifikan ini mencerminkan efek ketidakstabilan politik dan gejolak ekonomi yang ditimbulkan oleh kudeta.

Krisis politik setelah kudeta telah menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian dan instabilitas, menghalangi investasi dan menghambat aktivitas ekonomi. Protes yang meluas, kerusakan sipil, dan tindakan keras yang dilakukan oleh rezim militer semakin memperparah kemerosotan ekonomi, yang menyebabkan penutupan bisnis, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan kesempatan kerja di berbagai sektor.³³ Hal ini menggambarkan kondisi kontraksi ekonomi yang diperburuk oleh kudeta telah memperparah tantangan yang dihadapi oleh para pencari kerja, karena bisnis harus menghadapi penurunan permintaan konsumen, gangguan rantai pasokan, dan kendala keuangan. Selain itu, kesenjangan antara kinerja ekonomi Myanmar dan kinerja ekonomi negara-negara lain di kawasan menggarisbawahi parahnya keadaan negara tersebut. Sementara banyak negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang telah berhasil bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh pandemi, Myanmar masih tertinggal jauh akibat ketidakstabilan politik dan konflik.

Ketidakamanan Pangan di Myanmar

Temuan utama yang diperoleh dari *Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture* (GIEWS) yang diterbitkan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) memberikan gambaran yang mengkhawatirkan mengenai situasi ketidakamanan pangan di Myanmar. Situasi keamanan pangan yang kritis saat ini menjadi fokus utama karena

berbagai faktor yang saling terkait, yang semuanya diperburuk oleh kekacauan politik dan ketidakstabilan yang diakibatkan oleh kudeta.

Pertama, produksi pertanian yang berkurang pada tahun 2022 menyebabkan ketidakstabilan pasokan pangan di negara tersebut. Konflik yang semakin memburuk juga telah menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi sipil yang mencapai rekor tertinggi, dengan perkiraan mencapai 1,83 juta orang, naik tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022.³⁴ Ini berarti bahwa banyak masyarakat yang terpaksa meninggalkan lahan pertanian mereka, yang kemudian memperburuk ketidakstabilan produksi pertanian dan menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada bantuan pangan. Kedua, harga pangan yang melonjak juga telah memperburuk situasi. Harga pangan yang tinggi membuat akses terhadap pangan dasar semakin sulit bagi masyarakat yang terdampak, menyebabkan lebih banyak orang terjebak dalam kemiskinan dan kelaparan.

Ketiga, dampak siklon Mocha pada tahun 2023 yang menghantam negara tersebut juga memperparah keadaan. Siklon tersebut menyebabkan kerusakan yang luas terhadap infrastruktur dan sumber daya pertanian seperti lahan pertanian dan sistem irigasi, hal ini semakin membatasi kemampuan negara untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan.³⁵

Kondisi keamanan pangan yang parah juga mempengaruhi daerah-daerah tertentu di Myanmar dengan tingkat dan tingkat keparahan keamanan pangan yang tinggi. Dalam dokumen *Myanmar Humanitarian Needs and Response Plan 2024* yang diterbitkan oleh PBB, wilayah-wilayah di bagian barat laut dan tenggara, termasuk negara-negara Rakhine, Chin, Kayah, dan Kayin serta daerah Sagaing dan Mandalay dilaporkan mengalami tingkat keamanan pangan yang paling parah dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kudeta dan konflik bersenjata berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap pangan dasar dan memicu krisis kemanusiaan yang mendalam di beberapa daerah di Myanmar.³⁶

Gagalnya Junta Militer Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar

Teori Kebutuhan Dasar Manusia dari John Burton memberikan kerangka kerja untuk memahami resolusi konflik dan pembangunan perdamaian dengan menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar individu. Keamanan adalah kebutuhan dasar manusia, yang mencakup keselamatan fisik serta perlindungan dari ancaman dan kekerasan.³⁷ Kudeta militer di Myanmar telah menciptakan rasa tidak aman dan ketakutan yang meluas di kalangan penduduk. Konflik yang semakin meningkat, pengungsian warga sipil yang mencapai rekor tertinggi, dan penindasan politik telah merusak rasa aman masyarakat, membuat mereka rentan terhadap kekerasan dan

ketidakstabilan. Kegagalan junta militer untuk memberikan keamanan yang memadai bagi warganya telah mengganggu siklus konflik dan merusak upaya untuk mencapai perdamaian.

Security Needs

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Human Rights Watch dalam laporan mereka tentang lanskap pasca-kudeta di Myanmar tahun 2021. Jumlah korban tewas akibat tindakan keras junta mencapai 2.400 orang terbunuh hingga November 2022 versi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.³⁸ Tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan keamanan junta, yang melibatkan pembunuhan massal dan penangkapan sewenang-wenang terhadap jutaan orang yang menentang pemerintahannya, menciptakan suasana ketakutan dan ketidakamanan yang meluas di kalangan masyarakat. Penggunaan kekuatan mematikan dan penahanan sewenang-wenang merampas hak individu atas rasa aman, membuat mereka rentan terhadap kekerasan dan penganiayaan. Berdasarkan jumlah korban tewas tersebut, terbukti bahwa rezim ini bersedia untuk menggunakan langkah-langkah ekstrem untuk membasmi perbedaan pendapat dan mempertahankan cengkeraman kekuasaannya. Kurangnya transparansi dan keadilan dalam proses hukum semakin melemahkan keamanan individu, merampas perlindungan dasar yang diberikan oleh proses hukum dan supremasi hukum.

Identity and Recognition Needs

Myanmar memiliki sejarah panjang pemerintahan militer yang represif terhadap etnis minoritas yang telah sangat mempengaruhi identitas kolektif penduduknya yang beragam.³⁹ Transisi dari kekuasaan militer penuh pada tahun 2011 pada awalnya meningkatkan harapan akan reformasi demokratis, namun dominasi militer yang terus berlanjut atas pemerintah dan dimulainya kampanye pembersihan etnis terhadap kelompok minoritas Rohingya telah memperdalam perpecahan etnis dan memperparah ketegangan berbasis identitas di dalam negeri.⁴⁰

Menurut artikel dari *Council on Foreign Relations*, Myanmar memiliki lebih dari seratus kelompok etnis. Namun, posisi istimewa yang secara historis dinikmati oleh mayoritas etnis Burma, yang dikenal sebagai suku Bamar. Suku ini telah mengganggu ketidaksetaraan dan memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan di dalam kehidupan berpolitik di Myanmar. Konsentrasi kekuasaan politik dan militer di antara etnis Bamar telah meminggirkan kelompok etnis lainnya, yang berkontribusi terhadap keluhan berbasis identitas dan memicu konflik etnis.⁴¹

Kudeta militer pada Februari 2021, yang diikuti dengan tindakan keras terhadap aksi protes, semakin meningkatkan ketegangan etnis dan menggarisbawahi perlunya mengatasi keluhan berbasis identitas. Pembentukan kekuatan oposisi dan pemerintah bayangan, yang berujung pada perang saudara dan krisis kemanusiaan, menyoroti pentingnya identitas etnis dalam membentuk afiliasi politik dan dimensi konflik di Myanmar.

Menurut survei yang dilakukan oleh *United Institute of Peace*, ada dukungan luas untuk oposisi atau disebut Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) di antara berbagai kelompok etnis di Myanmar. Temuan utama dari survei ini menunjukkan bahwa NUG, yang terdiri dari perwakilan yang terpilih dalam pemilihan umum 2020 dan para pemimpin etnis minoritas, menikmati dukungan rakyat yang kuat di berbagai kelompok etnis di Myanmar. Dukungan ini dipandang sebagai fondasi yang menjanjikan untuk upaya menstabilkan negara. Hal ini menjadi bukti bahwa junta militer Myanmar tidak dapat merangkul etnis-etnis minoritas di Myanmar yang cenderung lebih mendukung Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).⁴²

Participation Needs

Participation Needs atau Kebutuhan Partisipasi mengacu pada kemampuan individu untuk bersuara dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam masyarakat demokratis, partisipasi yang berarti sangat penting untuk mendorong inklusi, akuntabilitas, dan legitimasi. Namun, kudeta militer di Myanmar telah menumbangkan lembaga-lembaga demokratis dan menekan perbedaan pendapat, sehingga merampas hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Tindakan keras terhadap masyarakat sipil, penyensoran media, dan penangkapan para pemimpin politik dan aktivis telah menghambat wacana publik dan merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pada Desember 2023, Myanmar menempati peringkat kedua terburuk di dunia dalam hal pemerjaraan jurnalis dengan 43 orang di balik jeruji besi, menurut *Committee to Protect Journalists*.⁴³ Dengan gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia ini, junta militer di Myanmar telah memperpanjang siklus konflik dan ketidakstabilan, memperdalam perpecahan di dalam masyarakat dan memperparah penderitaan penduduk. Untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan, penting bagi junta untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk keamanan, identitas, pengakuan, dan partisipasi, serta terlibat dalam upaya dialog dan rekonsiliasi yang tulus dengan semua segmen masyarakat.

Kesimpulan

Kudeta dan aksi-aksi rezim junta militer selanjutnya telah merusak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Kebrutalan dan penindasan rezim telah mengikis kepercayaan masyarakat Myanmar terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan menciptakan iklim ketakutan serta ketidakamanan, terutama di kalangan masyarakat yang terpinggirkan. Kudeta militer Myanmar pada tahun 2021 juga menyebabkan krisis kemanusiaan yang mengakibatkan Myanmar dilanda kemiskinan yang meluas, pengungsian, dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan keras junta militer terhadap perbedaan pendapat, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan telah mengakibatkan penderitaan dan kehilangan nyawa yang signifikan di antara penduduk sipil.

Berdasarkan Teori Kebutuhan Dasar Manusia dari John Burton, analisis situasi pasca-kudeta tahun 2021 di Myanmar menggarisbawahi pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mendasar untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Pelanggaran sistematis terhadap keamanan, identitas, pengakuan, dan partisipasi oleh junta militer telah memperparah siklus konflik, perpecahan, dan penderitaan di antara rakyat Myanmar.

Krisis kemanusiaan, konflik etnis, dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas menyoroti dampak mendalam dari kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi terhadap stabilitas dan kesejahteraan negara. Erosi keamanan dan penyangkalan identitas serta pengakuan telah memperdalam perpecahan serta memicu siklus kekerasan dan penindasan. Memenuhi kebutuhan dasar manusia ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi yang berkelanjutan di dalam kasus ini.

Catatan Kaki

¹ Sari Hardiyanto, "Kudeta Myanmar, Sebab, dan Apa yang Sebenarnya Terjadi? Halaman all - Kompas.com," *KOMPAS.com*, February 12, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi-?page=all>.

² BBC News, "Myanmar Coup: Tens of Thousands Join Largest Protests since 2007," *BBC News*, February 7, 2021, <https://www.bbc.com/news/world-asia-55967959>.

³ Voa, "Bachelet Peringatkan Krisis Kemanusiaan di Myanmar," *VOA Indonesia*, March 21, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/bachelet-peringatkan-krisis-kemanusiaan-di-myanmar/6495008.html>.

⁴ Ibid.

⁵ Isp Admin and Isp Admin, "All Armed and on the Verge of Breakdown - ISP-Myanmar," *ISP-Myanmar*, November 29, 2023, <https://ispmyanmar.com/ie-28/>.

⁶ The Guardian, "Myanmar's junta declares it will enforce military service laws for young people," February 21, 2024, <https://www.theguardian.com/world/2024/feb/11/myanmars-junta-declares-it-will-enforce-military-service-laws-for-young-people>

⁷ CNN, "Myanmar military conscription law sparks panic and fear as youth prepare to flee," February 22, 2024, <https://www.cnn.com/2024/02/22/asia/myanmar-mandatory-conscription-fears-young-people-intl-hnk-dst/index.html>

⁸ EFE, "4 children killed, 15 wounded in school bombing by military junta in Myanmar," February 5, 2024, <https://efe.com/en/latest-news/2024-02-05/4-children-killed-15-wounded-in-school-bombing-by-military-junta-in-myanmar/>

⁹ Reuters, "Myanmar junta plans to implement mandatory military service," February 14, 2024, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-junta-plans-implement-mandatory-military-service-april-media-say-2024-02-14/>

¹⁰ Reuters, "Myanmar junta enforces mandatory military service for young people," February 11, 2024, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-junta-enforces-mandatory-military-service-young-people-2024-02-11>

¹¹ BBC Indonesia. (n.d.). Setahun kudeta militer, warga sipil Myanmar angkat senjata, berlanjut ke 'perang saudara'. BBC News Indonesia. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60210964>

¹² Kompas. (2021, March 31). Konflik Myanmar, Negara dengan Perang Saudara Terlama di Dunia Halaman all. Kompas.com. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2021/03/31/151746470/konflik-myanmar-negara-dengan-perang-saudara-terlama-di-dunia?page=all>

¹³ CNBC Indonesia. (2024, March 1). Ketika Bisku Turun Tangan di Perang Saudara Tetangga RI. CNBC Indonesia. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240203122812-4-511427/ketika-bisku-turun-tangan-di-perang-saudara-tetangga-ri>

¹⁴ AMIKOM University Yogyakarta. (2024, March 1). The Ineffectiveness of UNHCR in Handling the Myanmar Conflict. *Journal of Information Systems for Industrial Systems, 1*(1). Retrieved from <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/nsjis/article/view/1061>

¹⁵ Lewis A. Coser, "Conflict: Resolution and Prevention, by John Burton," *Political Science Quarterly* 106, no. 3 (January 1, 1991): 574–75, <https://doi.org/10.2307/2151788>.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Institute of Peace and Conflict Studies, "Theories of Conflict Resolution : An Analysis | IPCS," 2005, <https://www.ipcs.org/focusthemsel.php?articleNo=1531>.

¹⁸ Lewis A. Coser, loc.cit.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ritha Safitri, "Mediasi Dan Fasilitasi Konflik Dalam Membangun Perdamaian," *Academica: Majalah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2

(2011), <https://www.neliti.com/id/publications/28523/mediasi-dan-fasilitasi-konflik-dalam-membangun-perdamaian#cite>.

²³ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, 1956, <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA11557899>.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya, 2005).

²⁵ Ibid.

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2010), http://digilib.fisip.undip.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2760.

²⁷ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5, no. 1 (2011), <http://repository.uinsu.ac.id/640/>.

²⁸ Thein, Htwe Htwe, and Htwe Htwe Thein. "Poverty and Conflict Cripple Myanmar's Post-Coup Economy | East Asia Forum." *East Asia Forum* (blog), February 27, 2024. <https://eastasiaforum.org/2024/02/27/poverty-and-conflict-cripple-myanmars-post-coup-economy/>.

²⁹ World Bank Group. "Myanmar Economic Recovery Falters as Conflict and Inflation Weigh." *World Bank*, December 12, 2023. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/12/12/economic-recovery-falters-as-conflict-and-inflation-weigh>.

³⁰ Irrawaddy, "Around 40% of Myanmar's Population Plunged into Poverty in 2022: World Bank," *The Irrawaddy*, August 4, 2023, <https://www.irrawaddy.com/news/burma/around-40-of-myanmars-population-plunged-into-poverty-in-2022-world-bank.html>.

³¹ Ibid.

³² World Bank Group, "Myanmar Economic Monitor June 2023: A Fragile Recovery. Key Findings," *World Bank*, December 11, 2023, <https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-june-2023-a-fragile-recovery-key-findings>.

³³ Ibid.

³⁴ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FOA). "GIEWS Update – The Republic of the Union of Myanmar, 31 July 2023 The Current Critical Food Insecurity Situation Could Deteriorate in the Second Half of 2023." *Fao.Org*. 05/2023, 2023. <https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc7195en>.

³⁵ Ibid.

³⁶ United Nations, "Myanmar Humanitarian Needs and Response Plan 2024," *Reliefweb.Int* (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2023), <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-needs-and-response-plan-2024-december-2023-enmy>.

³⁷ Lewis A. Coser, "Conflict: Resolution and Prevention, by John Burton," *Political Science Quarterly* 106, no. 3 (January 1, 1991): 574–75, <https://doi.org/10.2307/2151788>.

³⁸ "Myanmar," Human Rights Watch, January 20, 2023, <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/myanmar>.

³⁹ Lindsay Maizland, "Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict," *Council on Foreign Relations*, January 31, 2022, <https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² "Myanmar: New Data Show Wide Support for Unity Government," United States Institute of Peace, n.d., <https://www.usip.org/publications/2024/02/myanmar-new-data-show-wide-support-unity-government>.

⁴³ Beech, Hannah. "Myanmar Coup Highlights Autocracy's Rise in Southeast Asia." *The New York Times*, October 26, 2021. <https://www.nytimes.com/2021/04/12/world/asia/myanmar-coup-autocracy-democracy.html>.

Daftar Rujukan

Admin, Isp, and Isp Admin. "All Armed and on the Verge of Breakdown - ISP-Myanmar." ISP-Myanmar, November 29, 2023. <https://ispmyanmar.com/ie-28/>.

AMIKOM University Yogyakarta. (2024, March 1). The Ineffectiveness of UNHCR in Handling the Myanmar Conflict. *Journal of Information Systems for Industrial Systems, 1*(1). Retrieved from <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/nsjis/article/view/1061>

BBC Indonesia. (n.d.). Setahun kudeta militer, warga sipil Myanmar angkat senjata, berlanjut ke 'perang saudara'. BBC News Indonesia. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60210964>

BBC News Indonesia. "Korban tewas akibat Siklon Mocha meningkat tajam di Myanmar." *BBC News Indonesia*, May 20, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn074w2gylzo>.

BBC News. "Myanmar Coup: Aung San Suu Kyi Detained as Military Seizes Control." *BBC News*, February 1, 2021. <https://www.bbc.com/news/world-asia-55882489>.

———. "Myanmar Coup: Min Aung Hlaing, the General Who Seized Power." *BBC News*, February 1, 2021. <https://www.bbc.com/news/world-asia-55892489>.

———. "Myanmar Coup: Tens of Thousands Join Largest Protests since 2007." *BBC News*, February 7, 2021. <https://www.bbc.com/news/world-asia-55967959>.

- Beech, Hannah. "Myanmar Coup Highlights Autocracy's Rise in Southeast Asia." *The New York Times*, October 26, 2021.
<https://www.nytimes.com/2021/04/12/world/asia/myanmar-coup-autocracy-democracy.html>.
- CNBC Indonesia. (2024, March 1). Ketika Bisku Turun Tangan di Perang Saudara Tetangga RI. CNBC Indonesia. Retrieved from
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240203122812-4-511427/ketika-bisku-turun-tangan-di-perang-saudara-tetangga-ri>
- CNN, "Myanmar military conscription law sparks panic and fear as youth prepare to flee," February 22, 2024, <https://www.cnn.com/2024/02/22/asia/myanmar-mandatory-conscription-fears-young-people-intl-hnk-dst/index.html>
- Coser, Lewis A. "Conflict: Resolution and Prevention, by John Burton." *Political Science Quarterly* 106, no. 3 (January 1, 1991): 574–75.
<https://doi.org/10.2307/2151788>.
- . *The Functions of Social Conflict*, 1956. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA11557899>.
- EFE, "4 children killed, 15 wounded in school bombing by military junta in Myanmar," February 5, 2024, <https://efe.com/en/latest-news/2024-02-05/4-children-killed-15-wounded-in-school-bombing-by-military-junta-in-myanmar/>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FOA). "GIEWS Update – The Republic of the Union of Myanmar, 31 July 2023 The Current Critical Food Insecurity Situation Could Deteriorate in the Second Half of 2023." *Fao.Org*. 05/2023, 2023.
<https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc7195en>.
- Hardiyanto, Sari. "Kudeta Myanmar, Sebab, dan Apa yang Sebenarnya Terjadi? Halaman all - Kompas.com." *KOMPAS.com*, February 12, 2021.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi?page=all>.
- Human Rights Watch. "Myanmar," January 20, 2023.
<https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/myanmar>.
- Institute of Peace and Conflict Studies. "Theories of Conflict Resolution : An Analysis | IPCS," 2005.
<https://www.ipcs.org/focusthemsel.php?articleNo=1531>.

- Irrawaddy. "Around 40% of Myanmar's Population Plunged into Poverty in 2022: World Bank." The Irrawaddy, August 4, 2023. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/around-40-of-myanmar-population-plunged-into-poverty-in-2022-world-bank.html>.
- Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5, no. 1 (2011). <http://repository.uinsu.ac.id/640/>.
- Kompas. (2021, March 31). Konflik Myanmar, Negara dengan Perang Saudara Terlama di Dunia Halaman all. Kompas.com. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2021/03/31/151746470/konflik-myanmar-negara-dengan-perang-saudara-terlama-di-dunia?page=all>
- Maizland, Lindsay. "Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict." *Council on Foreign Relations*, January 31, 2022. <https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>.
- Mardalis. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2010. http://digilib.fisip.undip.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2760.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Quantum Journal of Social Sciences and Humanities. (n.d.). Future of the internal conflict in Myanmar. DOI:<https://doi.org/10.55197/qjssh.v2i2.45>. Retrieved from <https://www.qjssh.com/index.php/qjssh/article/view/45>
- Reuters, "Myanmar junta enforces mandatory military service for young people," February 11, 2024, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-junta-enforces-mandatory-military-service-young-people-2024-02-11>
- Reuters, "Myanmar junta plans to implement mandatory military service," February 14, 2024, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-junta-plans-implement-mandatory-military-service-april-media-say-2024-02-14/>
- Safitri, Ritha. "Mediasi Dan Fasilitasi Konflik Dalam Membangun Perdamaian." *Academica: Majalah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2011). <https://www.neliti.com/id/publications/28523/mediasi-dan-fasilitasi-konflik-dalam-membangun-perdamaian#cite>.
- The Guardian, "Myanmar's junta declares it will enforce military service laws for young people," February

- 21,2024,<https://www.theguardian.com/world/2024/feb/11/myanmar-junta-declares-it-will-enforce-military-service-laws-for-young-people>
- Thein, Htwe Htwe, and Htwe Htwe Thein. "Poverty and Conflict Cripple Myanmar's Post-Coup Economy | East Asia Forum." *East Asia Forum* (blog), February 27, 2024. <https://eastasiaforum.org/2024/02/27/poverty-and-conflict-cripple-myanmars-post-coup-economy/>.
- United Nations. "Myanmar Humanitarian Needs and Response Plan 2024." *Reliefweb.Int*. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2023. <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-needs-and-response-plan-2024-december-2023-enmy>.
- United States Institute of Peace. "Myanmar: New Data Show Wide Support for Unity Government," n.d. <https://www.usip.org/publications/2024/02/myanmar-new-data-show-wide-support-unity-government>.
- United States Institute of Peace. "Myanmar: New Data Show Wide Support for Unity Government," n.d. <https://www.usip.org/publications/2024/02/myanmar-new-data-show-wide-support-unity-government>.
- Voa. "Bachelet Peringatkan Krisis Kemanusiaan di Myanmar." *VOA Indonesia*, March 21, 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/bachelet-peringatkan-krisis-kemanusiaan-di-myanmar/6495008.html>.
- World Bank Group. "Myanmar Economic Monitor June 2023: A Fragile Recovery. Key Findings." *World Bank*, December 11, 2023. <https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-june-2023-a-fragile-recovery-key-findings>.
- . "Myanmar Economic Recovery Falters as Conflict and Inflation Weigh." *World Bank*, December 12, 2023. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/12/12/economic-recovery-falters-as-conflict-and-inflation->